



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 12 September 2018

BPK Dukung Polisi Bongkar Korupsi di Panca Karya

Ambon - BPK Perwakilan Maluku siap membantu Direskrimsus Polda Maluku membongkar dugaan korupsi di Panca Karya.

Audit investigasi akan dilakukan sesuai permintaan penyidik Ditreskrimsus.

“Dari BPK perwakilan Maluku sudah membalas surat penyidik. Surat baru diterima dua hari lalu dan akan segera dikoordinasikan, akan diekspos di BPK,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat, saat dihubungi *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Minggu (9/9).

Ohoirat mengatakan, koordinasikan akan dilakukan untuk tim penyidik melakukan ekspos di BPK.

“Kalau hendak melakukan ekspos penyidik tentu akan menyiapkan dokumen-dokumen penting dalam kasus ini,” ujarnya.

Lapor

Untuk diketahui, Direktur Utama Panya Karya, Afras Pattisahusiwa dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku atas dugaan penyimpangan milyaran rupiah pada perusahaan berplat merah itu.

Laporan tertulis itu disampaikan Ketua Badan Pengawas PD Panca Karya, Rury Moenandar, dan diterima oleh Bripda Adrian D Wattimena dengan laporan polisi nomor B/141/I/III/2018/Ditreskrimsus.

Dalam laporan tersebut yang kopiannya diterima redaksi *Siwalima*, Rabu (7/3), Moenandar membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian di Panca Karya yaitu, *satu*, adanya kontrak sepihak HPH yang dilakukan dengan sengaja tanpa melibatkan badan pengawas, dengan membuat MoU baru yang perjanjiannya sangat merugikan perusahaan.

Dalam kontrak kerjasama HPH di lokasi Buru itu, disepakati harga kayu Rp 120 ribu per kubik. Padahal sebelumnya Rp 150 ribu per kubik. MoU sepihak ini dilakukan tanpa mendapatkan pertimbangan dan persetujuan badan pengawas.

Dua, Dirut Panca Karya telah meminta DP dari pihak ketiga yakni PT Persada Anugerah Selaras sebesar Rp 12 milyar, yang pembayaran pergantiannya akan dipotong dari harga kayu sebesar Rp 50 ribu per kubik. Hal ini menyebabkan setiap pengangkutan kayu, Panca Karya hanya menerima Rp 70 ribu per kubik. Kolusi yang terjadi ini sangat merugikan perusahaan dan telah melanggar peraturan yang berlaku.

Ketiga, telah terjadi dugaan pungli atau permintaan jatah yang berbau KKN. Dimana adik kandung Dirut, Musttaqin Pattisahusiwa setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada KMP Tanjung Kuako di Dermaga Hunimua, Liang-Waipirit, untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp 500 ribu. Kalau dikalikan enam trip per hari berarti sebesar Rp 3 juta.

Empat, untuk lima KMP lainnya yang mendapatkan subsidi dari Departemen Perhubungan, sejak berlayar tidak pernah disetor pendapatannya ke kantor. Kondisi KKN yang terjadi pada kelima KMP ini juga telah merugikan perusahaan.

Selanjutnya *kelima*, kelima kapal yang bersubsidi ini telah menerima lunas biaya gaji ABK, uang makan, pakaian dinas dan biaya minyak maupun doking, tapi sampai saat ini Panca Karya masih mempunyai hutang pada PT Dok Waiame.

Enam Jam Diperiksa

Sebelumnya, selama enam jam lebih, Direktur Utama PD Panca Karya, Afras Pattisahusiwa diperiksa tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, pada Selasa (29/5).

Pattisahusiwa diperiksa dalam kasus dugaan korupsi yang melilit perusahaan daerah milik Pemprov Maluku yang dipimpinnya.

Ia diperiksa oleh penyidik Kopol Gerald Wattimena pukul 09.00 hingga 16.30 WIT, dan dicecar dengan 28 pertanyaan.

Sebelumnya, Musttaqin Pattisahusiwa selaku pengawas kapal-kapal feri Panca Karya dicecar penyidik Ditreskrimsus, Rabu (9/5) lalu. Ia diperiksa oleh penyidik Kopol Geral Wattimena, pukul 10.00 hingga 18.00 WIT dan dicecar 26 pertanyaan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Geledah

Tim penyidik Ditreskrimsus sebelumnya juga menggeledah ruang kerja Afras Pattisahusiwa, Rabu (2/5).

Tim memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja Afras. Mereka meneliti satu per satu dokumen. Setelah itu, mereka membawa sejumlah dokumen sekitar pukul 16.00 WIT. Afras sendiri saat itu tidak berada di kantor. Informasi yang diperoleh, ia sementara berada di Jakarta. **(S-27)**